

## LAYAK ANAK-KOTA

2019

PERDA KOTA PADANG NO. 12, LD 2019/NO.12, TLD. NO. 115 LL. 18 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 232-249.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.12 TAHUN 2019 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

### ABSTRAK

- untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah perlu membangun inisiatif yang mengarah kepada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, serta meningkatkan peran serta masyarakat secara luas dalam Penyelenggaraan KLA, perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- Dasar hukum peraturan ini adalah :  
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2009, Permen P3A No. 13 Tahun 2010; Permen P3A No. 5 Tahun 2011; Permen P3A Nomor 10 Tahun 2011; Permen P3A Nomor 11 Tahun 2011; Permen P3A Nomor 12 Tahun 2011; Permen P3A Nomor 13 Tahun 2011; Permen Sosial Nomor 21 Tahun 2013; Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2012.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Kota Layak Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Kota Layak Anak yang dimaksud adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak, diatur tentang sistem penyelenggaraan KLA, pengembangan, peningkatan Komitmen, Gugus Tugas KLA, Data Anak, Perencanaan, keluarga ramah anak, lingkungan layak anak dan ramah anak, sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, forum anak, kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, pendanaan, peran dunia usaha dan media masa, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 31 Desember 2019
- Penjelasan 4 hlm
- Peraturan pelaksana Perda ini lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota